

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Era modern saat ini terus mengalami kemajuan yang berarti dan telah mengubah banyak aspek, khususnya melalui kemajuan teknologi yang memiliki dampak besar pada berbagai aspek kehidupan manusia, terutama dalam memfasilitasi komunikasi dan interaksi sosial. Teknologi pada dasarnya dirancang untuk memudahkan manusia dalam menjalani kehidupan saat ini dan membuka peluang untuk masa depan yang lebih baik. (Oktaviani et al., 2023). Dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang, masyarakat sekarang dapat dengan mudah mengakses internet dan berinteraksi dalam membentuk jaringan sosial. Hal ini diperkuat oleh keberadaan berbagai aplikasi media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan sejenisnya. Penggunaan internet telah menjadi suatu keharusan dalam kehidupan masyarakat saat ini karena memungkinkan koneksi dengan pengguna internet di seluruh dunia. Keberadaan internet memungkinkan akses tanpa batas (Herdiana et al., 2022).

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dalam dunia bisnis menunjukkan adanya transformasi dalam proses persaingan. Dampaknya terasa secara nyata oleh sebagian masyarakat, mengubah pengalaman dari yang awalnya sederhana menjadi lebih instan seiring berjalannya waktu (Maulida Sari & Setiyana, 2020). *E-commerce* seperti mobile sentris sosial, memungkinkan

pelanggan untuk menjelajahi, berbelanja, dan menjual barang kapan saja dengan menggunakan ponsel mereka. Dengan penggunaan *E-commerce* sebagai media belanja, sebagian besar orang mulai membuka bisnis dan memenuhi berbagai kebutuhan dengan harga terjangkau. Perubahan perilaku ini menunjukkan bahwa masyarakat sekarang sangat bergantung pada teknologi media, karena penggunaan metode lama dalam dunia perbelanjaan mulai beralih ke *E-commerce* (Fahmi et al., 2023).

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah menjadi salah satu pilar utama dalam struktur ekonomi Indonesia. Keberadaan pelaku UMKM tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga memainkan peran penting dalam penggerak ekonomi di tingkat lokal. Kesuksesan UMKM di Indonesia dapat diatributkan kepada peran dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah. Sebagai contoh, pemerintah telah melaksanakan berbagai kegiatan, seperti *workshop* mengenai pemasaran digital, manajemen keuangan, dan pengembangan produk, dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para pelaku UMKM. Dengan demikian, penguatan keberhasilan UMKM dapat dicapai melalui dukungan konkret, seperti sosialisasi dan pelatihan, yang diberikan oleh pemerintah (Siregar, 2020). Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari peran serta kewajiban Pemerintah Daerah. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dan peran yang sangat signifikan dalam mengelola urusan pemerintahannya, termasuk dalam aspek pembangunan

ekonomi. Salah satu tugas utama Pemerintah Daerah dalam konteks pembangunan ekonomi adalah meningkatkan mutu kehidupan masyarakatnya. (Salam, 2022).

Namun, sejumlah kendala menghampiri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya panduan dan dukungan, minim pengetahuan teknologi, kekurangan modal, manajemen yang kurang efektif, infrastruktur yang masih belum memadai, kesulitan dalam memperoleh bahan baku, kesulitan mendapatkan izin usaha atau status hukum, serta keterbatasan dalam upaya pemasaran. Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha untuk memacu perkembangan UMKM dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengoptimalkan potensi sektor UMKM (Rusda, 2023). Maka dari itu, perkembangan teknologi yang terus meningkat memberikan peluang bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Saat ini, pelaku UMKM perlu bersiap untuk beralih ke ranah digital. Transformasi digital menjadi suatu keharusan karena kemajuan dunia digital yang cepat, sehingga UMKM harus mampu memanfaatkan teknologi digital guna menjaga kelangsungan bisnis dan menjaga keunggulan kompetitif mereka (Herdiana et al., 2022).

Penting bagi kemajuan suatu bangsa untuk memiliki keahlian literasi yang melibatkan semua aspek kehidupan. Pengukuran tingkat literasi atau keterampilan membaca, menulis, dan memahami informasi tertulis dikenal sebagai indeks literasi. Indeks literasi dapat mencakup berbagai bidang literasi, termasuk membaca, numerasi (kemampuan matematika), literasi digital (penguasaan

teknologi digital), literasi keuangan (manajemen keuangan), dan aspek lainnya (Fatmawati, 2023). Menilai indeks literasi dapat dilakukan melalui pengujian, survei, atau penelitian mendalam untuk mengevaluasi keterampilan individu atau kelompok dalam berbagai aspek literasi (Naufal, 2021).

Menurut Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), Indonesia mencapai skor 64,48 pada tahun 2022, diukur dalam skala 1-100. Angka ini menciptakan sebuah permasalahan serius sebagai isu nasional yang patut mendapat perhatian. UNESCO juga mencatat bahwa Indonesia menempati peringkat kedua terbawah dalam hal tingkat literasi. Literasi digital mempunyai beberapa indikator menurut Vuorikari, R., Punie, Y. Carretero, S., dan Van Den Brande L (2016), yaitu informasi dan melek data, komunikasi dan kolaborasi, keamanan, dan pemecahan masalah.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sendiri mempunyai roadmap menuju Indonesia Digital pada tahun 2020 (Nasionalita & Nugroho, 2020). DI Yogyakarta menunjukkan kemahiran tertinggi dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi digital dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Hasil survei tersebut mengungkapkan bahwa indeks literasi digital DI Yogyakarta pada tahun 2022 mencapai skor 3,64 poin dari skala 1-5. Meskipun demikian, terdapat penurunan sebesar 0,07 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana skornya mencapai 3,71 poin. Hal ini mencerminkan upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk merencanakan Indonesia Digital pada tahun 2020.

Kemampuan keterampilan digital memungkinkan para pengusaha untuk efektif menggunakan platform *E-commerce*, pemasaran digital, analisis data, dan manajemen inventaris. Selain itu, literasi digital bukan hanya tentang keahlian menggunakan teknologi, melainkan juga melibatkan pemahaman dan praktik yang bertanggung jawab terhadap media digital. UMKM yang memiliki tingkat literasi digital yang baik tidak hanya mampu mengoperasikan alat, tetapi juga dapat bertanggung jawab dalam menggunakan media digital. Oleh karena itu, untuk menilai sejauh mana UMKM memiliki keterampilan dalam menggunakan media digital, diperlukan alat ukur yang akurat. Pemanfaatan literasi digital dan keterampilan digital pada UMKM dapat membantu mencapai tujuan secara optimal dan juga mempertahankan hubungan yang baik antara konsumen dan pelaku UMKM, sehingga konsumen tetap loyal (Utami & Fauzi, 2023).

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berambisi menjadi kekuatan ekonomi menginginkan pengintegrasian teknologi digital dalam strategi pemasaran mereka. Keterlibatan UMKM dalam teknologi digital sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kesiapan mereka dalam mengadopsi teknologi dan kemampuan mereka dalam mentransformasi proses bisnis ke ranah digital (Huda et al., 2023). Di Indonesia, peran UMKM memiliki kepentingan yang signifikan. Secara umum, UMKM berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yogyakarta, yang terkenal sebagai kota pelajar, budaya, pariwisata, dan kreatif, menawarkan berbagai objek wisata, termasuk wisata alam, sejarah, budaya, dan pendidikan. Selain itu, perkembangan industri

kreatif di kota ini juga turut menjadi pelengkap bagi sektor pariwisata. Daya tarik dari objek wisata dan hasil industri kreatif, seperti oleh-oleh, menjadi daya tarik kuat bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Tingginya jumlah wisatawan mendorong pertumbuhan UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Tabel 1. 1 Jumlah Usaha di DIY Tahun 2019-2023**

Sub Elemen	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Usaha Mikro	143.385,00	188.033,00	318.892,00	324.745,00	329.132,00 *
Usaha Kecil	65.533,00	58.980,00	16.061,00	16.069,00	16.069,00 *
Usaha Menengah	39.581,00	30.664,00	2.107,00	2.110,00	2.109,00 *

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM DIY

Dilihat dari informasi di atas, pemberian rincian yang lebih banyak dalam pembagian menyebabkan peningkatan cakupan usaha dan kecenderungan nilai omset tahunan yang terus meningkat, stabil, atau mengalami sedikit penurunan dari tahun ke tahun. Usaha mikro mengalami pertumbuhan dari tahun 2019 hingga 2023, sementara usaha kecil cenderung stabil dalam periode yang sama. Di sisi lain, jumlah usaha menengah mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga 2023.

**Tabel 1. 2 Jumlah UMKM Kota Yogyakarta Tahun 2023**

UMKM	Tahun		
	2021	2022	2023
Kota Yogyakarta	39.021,00	32.793,00	39.807,00

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM DIY

Berdasarkan informasi dari Dinas Koperasi dan UMKM DIY, terdapat pertumbuhan jumlah UMKM di Kota Yogyakarta dari tahun 2021 hingga 2023. Puncak peningkatannya terjadi pada tahun 2023, mencapai 39.807,00 unit. Melihat peningkatan tersebut, diperlukan pemahaman digital untuk mendukung potensi UMKM dan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pemasaran online, baik melalui media sosial maupun *e-commerce*. Agar dapat optimal dalam memasarkan produknya secara global, UMKM perlu membuka diri terhadap perkembangan zaman (Purwana et al., 2017). Masyarakat yang mencari produk atau layanan khusus kini dapat dengan mudah menemukan dan mengakses UMKM yang mereka cari melalui platform *e-commerce* dan media sosial. Inisiatif tersebut dapat mendukung UMKM dalam meningkatkan tingkat keterlibatan mereka dan memperluas peluang pasar di era digital saat ini. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi tingkat pengangguran dan menjaga stabilitas ekonomi.

Hasil penelitian Erlanitasari (2019) menunjukkan hanya 36% UMKM di Indonesia masih berkuat dengan pemasaran konvensional. Namun, 37% dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hanya memiliki kemampuan

pemasaran online yang terbatas, seperti memiliki akses ke komputer dan *broadband*. Sebaliknya, sekitar 18% UMKM memiliki kemampuan pemasaran online yang sedang, karena mampu menggunakan situs web dan media sosial. Hanya sekitar 9% UMKM yang memiliki kemampuan pemasaran digital yang dapat dianggap tingkat lanjut. Ironisnya, meskipun laporan dari Google, Temasek, dan Bain menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai potensi dalam peningkatan perekonomian digital mencapai USD 124 miliar pada tahun 2025 (Permana, 2021). Perlu adanya peran pemerintah untuk mendorong percepatan penerimaan teknologi digital oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertujuan agar UMKM tetap efisien dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pola perilaku konsumen.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini mencoba mengkaji dengan memilih variabel Peran Pemerintah dan Literasi Digital sebagai faktor yang dirasa memiliki pengaruh terhadap resiliensi UMKM. Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PERAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN LITERASI DIGITAL BAGI PELAKU UMKM DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020-2022”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “bagaimana peran pemerintah dalam peningkatan literasi digital bagi pelaku UMKM Di Kota Yogyakarta tahun 2020-2022”.



### **C. Tujuan**

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman mengenai peran yang dimainkan oleh pemerintah dalam meningkatkan tingkat literasi digital bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Yogyakarta. Dengan tujuan tersebut, peneliti bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang lebih mendalam guna menganalisis sejauh mana pemerintah Kota Yogyakarta berhasil mengatasi tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam menghadapi perkembangan teknologi. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi berupa rekomendasi atau evaluasi, yang dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan pemerintah di masa yang akan datang.

### **D. Manfaat**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diinginkan dapat memberikan kontribusi berupa ide, pemahaman, dan pengetahuan tambahan tentang peran pemerintah dalam meningkatkan literasi digital. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lain untuk melakukan studi lebih lanjut, terutama dalam konteks UMKM di Kota Yogyakarta pada masa mendatang.

#### **b. Manfaat Praktis**

Sebagai standar evaluasi bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam upaya meningkatkan literasi digital bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi

acuan penting dalam penyusunan dokumentasi ilmiah yang memberikan manfaat baik di lingkup akademis maupun di luar ranah akademis.

### E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini memanfaatkan sepuluh artikel sebagai tinjauan pustaka yang mengangkat berbagai permasalahan, dengan tujuan utama menciptakan peran pemerintah dalam meningkatkan literasi digital dan keterampilan digital bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Yogyakarta. Berikut merupakan *literature review* :

**Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Temuan
1.	Muhamad Tsani Farhan, Henry Eryanto, Ari Saptono	PENGARUH LITERASI DIGITAL DAN ORIENTASI KEWIRAUSAHAAN TERHADAP KINERJA USAHA UMKM (Studi pada UMKM SEKTOR Food and Beverage di Jakarta Selatan)	Menunjukkan bahwa literasi digital dan orientasi kewirausahaan memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap kinerja usaha UMKM. Sama halnya, literasi digital yang dipengaruhi oleh orientasi kewirausahaan juga berkontribusi terhadap kinerja

			usaha UMKM di sektor makanan dan minuman di wilayah Jakarta Selatan
2.	Didik Nurhadi, Harti, Siti Sri Wulandari	Pengaruh Literasi Digital, Karakter Kewirausahaan dan Keunggulan Bersaing Terhadap Keberhasilan Berwirausaha Pada Anggota AWBE Sidoarjo	Literasi digital dan kemampuan bersaing memiliki efek yang cukup besar pada kesuksesan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Wirausaha Bringin Emas Sidoarjo. Di sisi lain, karakteristik wirausaha tidak berdampak secara signifikan terhadap keberhasilan anggota Asosiasi Wirausaha Bringin Emas Sidoarjo
3.	Siti Khodijah, Azizah Indriyani	Analisis Perilaku Pelaku UMKM Kuliner dalam Perspektif Literasi Digital	Berdasarkan hasil penelitian tersebut, sebagian besar atau banyaknya tingkat literasi media digital pada pelaku usaha kecil menengah masih dapat dianggap sebagai tingkat yang sedang
4.	Nurul Huda1, Aliah Pratiwi, Aris Munandar	PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN LITERASI DIGITAL TERHADAP	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Literasi Digital Berpengaruh signifikan terhadap Kinerja UMKM Kota Bima

		KINERJA UMKM KOTA BIMA	
5.	Fernando, Sarwo Edy Handoyo	PENGARUH LITERASI DIGITAL, MEDIA SOSIAL, DAN E-COMMERCE TERHADAP KEPUTUSAN BERWIRAUSAHA MAHASISWA	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi digital memberikan dampak positif dan bermakna pada keputusan untuk berwirausaha. Di sisi lain, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari media sosial dan E-commerce terhadap keputusan untuk berwirausaha
6.	Diah Ayu Kusumawati Pungky Lela Saputri	Digital Transformation: Peran Digital Skill Dan E-Readiness Pada UMKM	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan digital dan e-readiness mempengaruhi transformasi digital secara positif dan signifikan
7.	Lela Nurlela Wati, Rita Yuni Mulyanti, A. Mukti Soma, Supriatiningsih, Hidayat Darwis	PENINGKATAN DIGITAL SKILL BAGI PENGUSAHA UMKM	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orang - orang yang sebelumnya kurang memahami manfaat dari keterampilan digital dalam mengelola usaha mereka, sekarang mampu meningkatkan kualitas mereka sebagai pelaku

			Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tengah persaingan era digitalisasi ini
8.	Eka Khusniatuz Zahro	Digital Literacy Skill dalam Upaya Peningkatan Laba Usaha pada Kalangan Pelaku Usaha Kecil di Kota Surabaya	Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa para pengusaha skala kecil di Kota Surabaya memiliki tingkat literasi digital yang sangat tinggi. Keahlian dalam pemasaran online juga terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan omset penjualan bulanan, sementara partisipasi aktif dalam forum media sosial memiliki dampak positif terhadap laba bersih tahunan
9.	Amelia Dwi Handayani	Digitalisasi UMKM: Peningkatan Kapasitas Melalui Program Literasi Digital	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat literasi digital dari para pelaku usaha menjadi aspek kunci dalam proses digitalisasi UMKM. Dengan penguasaan

			<p>literasi digital yang memadai, UMKM dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan teknologi terkini, mengadopsinya untuk meluaskan cakupan pasar, memonitor operasional bisnis, meningkatkan pendapatan, serta mengurangi biaya untuk aktivitas yang lebih efisien. Lebih lanjut, pelaku usaha yang memiliki literasi digital yang baik juga dapat terus berinovasi, mengeksplorasi potensi, dan meningkatkan kualitas produknya</p>
10.	<p>Monica Dwipi Salam, Ananta Prathama</p>	<p>Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan UMKM</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya telah berhasil menjalankan perannya secara efektif dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah(UMKM) di Kampung Kue. Fakta ini terbukti</p>

			<p>melalui evaluasi indikator seperti stabilisator, inovator, modernisator, dan pelopor yang telah berkontribusi signifikan dalam upaya pengembangan UMKM di Kampung Kue. Partisipasi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya mencerminkan dedikasi mereka dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM di wilayah tersebut melalui serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan peningkatan daya saing UMKM di Kampung Kue</p>
--	--	--	---

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan penelitian sebelumnya dalam beberapa aspek kunci. Pertama, penelitian sebelumnya tidak memasukkan variabel peran pemerintah dan literasi digital pada pelaku UMKM. Penelitian ini secara khusus mengeksplorasi bagaimana peran pemerintah dapat meningkatkan literasi digital pelaku

UMKM di Kota Yogyakarta, memberikan wawasan lebih mendalam tentang cara UMKM dapat meningkatkan ketahanan mereka di era bisnis yang semakin tergantung pada teknologi digital. Kedua, penelitian ini difokuskan pada Kota Yogyakarta sebagai lokasi penelitian. Hal ini menjadi penting karena kondisi sosial, ekonomi, dan bisnis dapat bervariasi di setiap wilayah, sehingga hasil penelitian yang didasarkan pada konteks Kota Yogyakarta memiliki relevansi yang lebih langsung bagi pemangku kepentingan di wilayah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini membedakan dirinya dari penelitian sebelumnya dengan menyoroti peran pemerintah dalam meningkatkan literasi digital bagi pelaku UMKM di Kota Yogyakarta.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan rangkaian konsep yang dibentuk dari beberapa teori, bertujuan untuk mendukung peneliti dalam melakukan studi. Tujuan utama teori ini adalah untuk mengantisipasi, menjelaskan, meramalkan, dan menemukan hubungan antara fakta-fakta dengan cara yang terstruktur (Yusuf, 2017). Kerangka teori menjelaskan teori yang berhubungan dengan variabel atau pokok permasalahan pada penelitian. Berikut teori yang digunakan pada penelitian ini diantaranya :

### **1. Teori Peran Pemerintah**

Menurut Abdulsyani (2012:92) dalam Kamus Besar Bahasa, peran sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang menggunakan suatu cara untuk menggunakan hak dan kewajibannya yang disesuaikan dengan statusnya



dalam masyarakat. Seseorang dianggap berhasil memenuhi perannya dengan baik ketika ia berhasil melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan posisi sosial pada masyarakat. Dalam perspektif masyarakat, peran dianggap sebagai komponen dinamis dalam kedudukan (status) ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya. Dia juga menekankan bahwa peran seseorang seharusnya selaras dengan posisi yang diemban dalam interaksi sosial. Posisi individu dalam masyarakat dianggap sebagai unsur statis yang mencerminkan letak seseorang dalam struktur masyarakat.

Duverger (2010; 102) menyatakan bahwa Peran merupakan komponen dari kedudukan sosial karena muncul sebagai karakteristik yang timbul dari kedudukan, serta mencerminkan harapan perilaku masyarakat terhadap individu yang menduduki kedudukan tersebut. Sementara itu, Stoetzel dalam Maran (2007: 50), menyatakan bahwa "status adalah pola perilaku kolektif yang secara umum diharapkan oleh seseorang dari orang lain, sementara peranan merupakan pola perilaku kolektif yang diharapkan oleh orang lain terhadap individu tersebut". Posisi ini tidak dapat dipisahkan dari eksistensi manusia, sama seperti peran. Pada dasarnya, manusia membawa berbagai peran yang berasal dari pola-pola hidup sosial mereka. Dengan kata lain, peran ini menentukan tindakan yang diambil oleh masyarakat dan pemberian yang diterima oleh individu dari masyarakat.

Menurut Soekanto (2012) Peran merupakan aspek dinamis dari posisi seseorang muncul ketika individu memenuhi hak dan kewajibannya sesuai

dengan peran yang diembannya. Dengan melakukan hal tersebut, seseorang aktif dalam memainkan perannya, memberikan pemahaman yang lebih jelas. Sebelum kita menggali lebih dalam tentang konsep peran, penting untuk memahami definisi peran itu sendiri. Dari penjelasan mengenai peran tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan pelaksanaan tindakan yang diinginkan oleh masyarakat atau individu lain, sesuai dengan posisi sosial mereka. Sehingga, pelaksanaan peran tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan mereka.

Menurut Pranadjaja (2003) gagasan Pemerintah menjelaskan bahwa Kata "pemerintah" berasal dari istilah "perintah," yang merujuk pada rangkaian kata yang dimaksudkan untuk memberikan petunjuk atau menyuruh untuk melakukan suatu tindakan. Pemerintah dapat merujuk kepada individu, organisasi, atau lembaga yang memberikan atau menghapuskan perintah.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013, pemerintah telah merumuskan kebijakan terkait pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu aspek kebijakan tersebut adalah mendorong pelaku UMKM untuk bergabung dalam platform digital melalui Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Hingga akhir tahun 2020, sudah tercatat sebanyak 11,7 juta UMKM yang telah terdaftar dalam program ini. Proyeksi untuk tahun 2030, seperti yang

diinformasikan oleh voa Indonesia, menunjukkan harapan bahwa jumlah UMKM yang terlibat dalam transformasi digital dapat mencapai 30 juta (Ghita Intan, 2022). Selain itu, Pemerintah juga menggalakkan peningkatan ekspor produk Indonesia melalui penyelenggaraan *ASEAN Online Sale Day (AOSD)* pada tahun 2020 (Hendri, 2021).

Menurut Nirwana (2017) Dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), peran pemerintah dapat terlihat melalui beberapa ciri yang mencerminkan keterlibatan mereka dalam memajukan sektor ini. Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dengan menciptakan lingkungan regulasi yang mendukung pertumbuhan UMKM melalui kebijakan yang menyederhanakan proses pendirian usaha, mengurangi birokrasi, dan memberikan insentif pajak.

Menurut Arif dalam Adhawati (2012:9) Peran Pemerintah dibagi dalam 4 fungsi yaitu :

1. Fungsi Pemerintah sebagai regulator

Peran Pemerintah dengan cara menyiapkan cara dalam menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan, seperti dengan menerbitkan peraturan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan efektivitas pembangunan Masyarakat

2. Fungsi Pemerintah sebagai dinamisator

Peran Pemerintah yang mampu memberikan pengarahan dan bimbingan kepada masyarakat, serta mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap pembangunan

3. Fungsi Pemerintah sebagai fasilitator

Peran Pemerintah dalam membangun pendampingan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat

4. Fungsi Pemerintah sebagai Katalisator

Peran Pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan pengembangan program Pemerintah

Dapat ditarik kesimpulan bahwa peran krusial pemerintah dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting. Definisi UMKM merujuk pada usaha dengan skala kecil yang memiliki peran signifikan dalam perekonomian, mencakup berbagai sektor seperti manufaktur dan jasa. Pemerintah menyadari potensi besar UMKM dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan mengurangi disparitas ekonomi. Pemahaman pemerintah tentang peran UMKM tidak hanya terbatas pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga pada pengakuan bahwa mendukung UMKM dapat berkontribusi dalam mengurangi disparitas ekonomi dalam masyarakat. Dengan memberikan dukungan kepada UMKM, pemerintah membuka peluang bagi pengusaha kecil untuk

tumbuh dan berkembang, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Nirwana (2017) juga menjelaskan bahwa peran Pemerintah dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tercermin melalui beberapa karakteristik yang menunjukkan keterlibatan mereka dalam mengembangkan sektor ini. Sebagai fasilitator, pemerintah menciptakan lingkungan regulasi yang mendukung pertumbuhan UMKM melalui kebijakan yang menyederhanakan proses pendirian usaha, mengurangi birokrasi, dan memberikan insentif pajak. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai penyedia sumber daya dengan memberikan akses kepada UMKM terhadap pembiayaan, pelatihan, dan teknologi guna meningkatkan daya saing mereka.

Peran pemerintah dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersandar pada prinsip untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan menghasilkan lapangan pekerjaan. Dengan demikian, penerapan prinsip ini dapat membantu UMKM menghadapi tantangan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional. Pemerintah juga bertindak sebagai pemimpin dalam memfasilitasi kerja sama antara UMKM, lembaga keuangan, dan sektor pendidikan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung.

Keterlibatan pemerintah dalam perkembangan UMKM membawa manfaat signifikan, di mana pemerintah tidak hanya fokus pada mengoptimalkan potensi pelaku usaha, melainkan juga melaksanakan upaya pemberdayaan sumber daya manusia dan penyediaan prasarana untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Menurut (Rusda, 2023), pengembangan UMKM memerlukan peran aktif baik dari internal, yakni pelaku usaha, maupun eksternal, yakni pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah perlu memberikan kontribusi nyata dan terlibat dalam kegiatan pengembangan UMKM, bukan hanya memberikan perhatian semata. Langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar dukungan yang komprehensif diberikan kepada UMKM. Selain menyediakan sumber daya finansial, dukungan ini juga mencakup bantuan teknis, pelatihan, dan peluang akses pasar yang lebih luas. Dengan demikian, langkah-langkah ini tidak hanya akan membantu UMKM bertahan, tetapi juga mendorong pertumbuhan dan inovasi di tengah tantangan yang terus berkembang di era globalisasi ini.

## **2. Teori Literasi Digital**

Menurut definisi UNESCO, literasi merujuk pada keterampilan yang melibatkan kemampuan mengenali, memahami, menafsirkan, membuat, berkomunikasi, menghitung, dan menggunakan materi cetak dan tulisan untuk berbagai maksud. Hal ini bertujuan Untuk memperluas wawasan dan

mengoptimalkan bakat pribadi, serta untuk secara aktif terlibat dalam lingkungan sosial dan masyarakat secara menyeluruh (Ayuni, 2015).

Menurut pendapat Hague & Payton (2010), Literasi digital merupakan keterampilan pada seorang dengan memanfaatkan perangkat digital dengan kemampuan fungsional. Ini mencakup kapasitas individu untuk mencari, memilih, memproses informasi, berpikir secara kritis, kreasi, kolaborasi, dan komunikasi dengan efisiensi.

Menurut Martin (2008), Literasi digital merupakan keahlian individu dalam memanfaatkan perangkat digital dengan tepat guna sehingga mereka mampu mengeksplorasi, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, dan menganalisis sumber daya digital. Tujuannya adalah untuk memperoleh pengetahuan baru, menyampaikan ekspresi melalui media, serta berkomunikasi dengan orang lain dalam konteks kehidupan tertentu demi mewujudkan perkembangan sosial. Beberapa bentuk literasi digital mencakup pemahaman terhadap komputer, teknologi informasi, aspek visual, dan komunikasi.

Sementara itu, Douglas A.J. Belshaw dalam tesisnya *What is 'Digital Literacy'?* (2012) menjelaskan terdapat 8 elemen esensial dalam mengembangkannya literasi digital, yaitu sebagai berikut :

1. Aspek kultural melibatkan penjelasan terhadap berbagai hal dalam penggunaan di era digital.

2. Kemampuan kognitif mencakup proses berpikir untuk mengevaluasi isi konten.
3. Sifat konstruktif melibatkan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang berpengetahuan dan sesuai dengan realitas.
4. Komunikatif secara dimensial melibatkan pemahaman terhadap dinamika komunikasi dan jaringan di ranah digital.
5. Memimpin diri dengan penuh tanggung jawab.
6. Kreativitas dalam kemampuan menerapkan pendekatan baru untuk menjalankan tindakan inovatif.
7. Sikap kritis dalam menanggapi berbagai konten dan literasi digital sebagai keterampilan penting dalam kehidupan sehari-hari.
8. Tanggung jawab sosial yang kuat.

Berdasarkan pemahaman tersebut, literasi digital tidak terbatas pada penggunaan perangkat digital saja. Idealnya, individu diharapkan mampu melibatkan diri dalam pemikiran kritis, kreativitas, kolaborasi dengan orang lain, komunikasi yang efektif, dan menjaga keamanan elektronik dan memperhatikan konteks sosial-budaya yang sedang berkembang.

Dalam usaha untuk mempercepat perubahan digital, pemerintah memusatkan perhatian pada tujuan mendorong 30 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk beralih ke platform digital pada tahun 2024 (Kemenko Perekonomian, 2022). Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menjalin kerja sama dengan *Indonesian E-Commerce Association (idEA)* untuk



mempromosikan pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia, menciptakan lebih banyak peluang bagi produk-produk UMKM (Zahiroh, 2022).

Peningkatan pemahaman digital memiliki dampak signifikan terhadap kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan peningkatan literasi digital, pelaku UMKM dapat lebih efisien menggunakan teknologi informasi dan internet dalam berbagai aspek bisnis mereka. Meskipun demikian, tantangan muncul seiring dengan upaya meningkatkan pemahaman digital di kalangan UMKM, seperti biaya implementasi teknologi yang tinggi dan kekurangan tenaga kerja yang memiliki keterampilan digital. Keberhasilan UMKM dalam mengadopsi literasi digital tidak hanya tergantung pada perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, melainkan juga pada kemampuan mereka dalam mengelola dan menganalisis informasi digital (Wibowo, 2021).

Penggunaan internet memberikan berbagai keuntungan, termasuk di sektor ekonomi digital. Salah satu contohnya adalah dalam proyeksi potensi ekonomi digital Indonesia yang diperkirakan mencapai sekitar 124 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada tahun 2025. Dalam acara Literasi Digital secara daring, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyatakan bahwa pemerintah sedang mengakselerasi pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang digital. Dengan peningkatan penggunaan internet, perkembangan teknologi pun terjadi dengan cepat, dan transformasi digital merasuk ke berbagai aspek kehidupan Masyarakat (Kompas.com 2021).

Indikator-indikator literasi digital menurut Vuorikari, R., Punie, Y., Carretero, S., & Van Den Brande, L. (2016) yaitu:

1. Informasi dan melek data  
Mencari data yang sesuai, menyimpan data atau informasi yang didapatkan
2. Komunikasi dan kolaborasi  
Berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain melalui digital
3. Keamanan  
Melindungi keamanan perangkat dan keamanan pribadi dalam penggunaan digital
4. Pemecahan masalah  
Mengidentifikasi masalah dan menggunakan digital untuk menyelesaikan masalah.

Literasi digital melibatkan pemberian pengetahuan dan pemahaman kepada individu tentang cara menggunakan teknologi dan media internet untuk mempromosikan usaha mereka (Doni, 2021). Ini berarti literasi digital tidak hanya berfokus pada penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak, melainkan lebih menekankan kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi digital secara bijaksana. Tingkat literasi digital yang tinggi memungkinkan akses lebih cepat terhadap informasi, sambil juga menampukkan individu untuk mengelola dan menyajikan informasi tersebut dengan cara yang menarik dan relevan. Selain itu, kemampuan untuk beradaptasi dengan

perkembangan teknologi terkini menjadi keunggulan kompetitif, memungkinkan pelaku usaha untuk tetap relevan dan inovatif di tengah lingkungan bisnis yang selalu berubah.

Agar bisa menyambut generasi Z (Gen-Z) di abad ke-21, terutama dalam menghadapi pertumbuhan pasar digital yang semakin signifikan, pentingnya literasi digital di kalangan UMKM semakin meningkat. Di samping itu, kemajuan dalam literasi digital UMKM memiliki potensi untuk mendorong tercapainya transformasi digital yang adil. Hal ini pada akhirnya dapat berkontribusi secara signifikan terhadap perbaikan bantuan ekonomi makro bagi negara (Pakidulan et al., 2021). Dengan peningkatan literasi digital, UMKM dapat lebih siap dan mampu mengambil manfaat penuh dari kemajuan teknologi informasi dan internet.

Dengan memahami secara mendalam cara-cara yang efektif untuk menggunakan platform digital, UMKM dapat meningkatkan efisiensi operasional, menjangkau pasar yang lebih luas, dan meningkatkan daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu, investasi dalam peningkatan literasi digital di kalangan UMKM bukan hanya tanggung jawab mereka sendiri, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi nasional di era abad ke-21 yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Dengan memberikan prioritas pada literasi digital, kita tidak hanya mempersiapkan UMKM untuk menghadapi masa depan digital, tetapi

juga membuka peluang untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Dapat disimpulkan bahwa peningkatan literasi digital memberikan manfaat bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dimana tingkat literasi digital yang lebih tinggi memungkinkan para pelaku UMKM untuk lebih efisien menggunakan teknologi informasi dan internet dalam berbagai aspek kegiatan bisnis.

## **G. Definisi Konseptual**

### **1. Peran Pemerintah**

Pemerintah sebagai aktor utama, diartikan sebagai lembaga yang mengeluarkan perintah dan petunjuk, menunjukkan keterlibatan aktif dalam membentuk perannya. Kebijakan pemerintah terkait Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencakup program pemberdayaan dan upaya untuk mendorong keterlibatan UMKM dalam platform digital. Selain itu, pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dan penyedia sumber daya dengan menciptakan lingkungan regulasi yang mendukung. Ini melibatkan penyediaan pembiayaan, pelatihan, dan teknologi, serta memimpin kerja sama antara UMKM, lembaga keuangan, dan sektor pendidikan.

### **2. Literasi Digital**

Literasi digital merupakan keterampilan menggunakan perangkat digital dengan kemampuan fungsional. Ini mencakup berbagai keterampilan penting,

seperti kemampuan melakukan pencarian informasi, memproses data, berpikir kritis, bersifat kreatif, berkolaborasi, dan berkomunikasi secara efisien. Selain itu, literasi digital juga mencakup pemahaman yang mendalam tentang cara berinteraksi dengan teknologi digital secara positif dan produktif. Dengan mengembangkan literasi digital, seseorang dapat mengoptimalkan potensi perangkat digital untuk mendukung aktivitas sehari-hari, pekerjaan, dan partisipasi dalam masyarakat yang semakin terhubung secara teknologi.

## **H. Definisi Operasional**

Peran yang dimainkan oleh pemerintah dalam meningkatkan literasi digital dan keterampilan digital bagi para pelaku UMKM di Kota Yogyakarta memiliki peran krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sektor UMKM tersebut. Keterlibatan pemerintah bukan hanya menjadi faktor penting bagi kesuksesan ekonomi pelaku UMKM itu sendiri, tetapi juga merupakan elemen yang esensial dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan peningkatan literasi digital, diharapkan UMKM dapat mengalami kemajuan yang lebih efisien dan cepat. Dalam rangka mengukur kontribusi pemerintah, penelitian ini menggunakan empat indikator serta harus didukung dengan salah satu indikator literasi digital yang dapat diukur sebagai tolok ukur keberhasilan peran pemerintah dalam meningkatkan literasi digital dan keterampilan digital bagi pelaku UMKM di Kota Yogyakarta :

**Tabel 1. 4 Definisi Operasional**

No	Variabel	Indikator	Parameter
1.	Peran Pemerintah	Fasilitator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan keterampilan secara teknis</li> <li>2. Memberikan fasilitas dan infrastruktur, menyokong keuangan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan pelayanan penyuluhan dan pendampingan</li> <li>3. Memberikan bantuan dalam menemukan Solusi agar UMKM dapat memperoleh pendanaan</li> </ol>
		Peran pemerintah sebagai fasilitator yang berkaitan dengan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Secara informasi dan data</b> digunakan untuk memberdayakan UMKM</li> </ol>

		<p>indikator literasi digital yang dijabarkan sebagai berikut :</p>	<p>dan memberikan fasilitas yang terbaik bagi para pelaku UMKM</p> <p>2. <b>Secara kolaborasi dan komunikasi</b> digunakan untuk menyalurkan informasi dan wawasan dari para ahli kepada pelaku usaha dalam meningkatkan literasi digital bagi setiap UMKM</p> <p>3. <b>Sebagai sarana keamanan</b> pelaku usaha dalam menggunakan aplikasi buatan pemerintah untuk memberikan informasi dan mendata UMKM</p> <p>4. <b>Sebagai sarana pemecahan masalah</b> bagi pelaku UMKM</p>
--	--	---	--

			yang bingung dalam menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan pendapatan usahanya
		Regulator	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UKM dalam Mengembangkan usahanya</li><li>2. Menjaga kondisi lingkungan</li><li>3. Merumuskan kebijakan terkait peraturan dalam kompetisi bisnis</li><li>4. Memfasilitasi kebutuhan UMKM</li><li>5. Meningkatkan produktivitas UMKM</li></ol>



			<p>6. Mengatasi masalah UMKM</p> <p>7. Meningkatkan mutu dan kualitas UMKM</p>
		<p>Peran pemerintah sebagai regulator yang berkaitan dengan literasi digital dijabarkan sebagai berikut :</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Secara informasi dan data</b> digunakan sebagai bahan dalam pembentukan peraturan, dimana pemerintah membutuhkan beberapa informasi dan data dalam perumusan peraturan tersebut</li> <li>2. <b>Secara komunikasi dan kolaborasi</b> juga dibutuhkan saat pemerintah menyusun peraturan yang berfokus pada peningkatan literasi digital bagi UMKM</li> <li>3. <b>Secara keamanan,</b> pemerintah menjamin</li> </ol>

			<p>keamanan bagi masyarakat dalam bentuk rumusan peraturan tersebut</p> <p>4. <b>Secara pemecahan masalah</b>, peraturan yang telah dibuat dan disahkan oleh pemerintah dapat digunakan sebagai alat pemecah masalah yang terjadi pada pelaku usaha UMKM</p>
		Katalisator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempercepat proses berkembangnya UMKM</li> <li>2. Pemberdayaannya komunitas kreatif dalam produktif bukan konsumtif</li> <li>3. Penghargaan pada UMKM</li> <li>4. Prasarana intelektual untuk UMKM</li> </ol>

			<p>5. Permodalan mencakup modal ventura atau modal yang dapat digulir</p>
		<p>Peran pemerintah sebagai katalisator yang berkaitan dengan literasi digital dijabarkan sebagai berikut :</p>	<p>1. <b>Secara informasi dan data</b> dibutuhkan sebagai bahan dalam pengembangan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah</p> <p>2. <b>Secara komunikasi dan kolaborasi</b>, peran pemerintah sebagai katalisator adalah penyediaan tempat komunikasi dan kolaborasi secara terbuka bagi pelaku UMKM yang ingin memasarkan produk atau jasanya melalui acara pameran yang diadakan oleh pemerintah</p>

			<p>3. <b>Secara keamanan</b> digunakan pemerintah untuk menjaga kerahasiaan atas data pelaku UMKM yang telah terintegrasi dalam aplikasi yang dirancang oleh pemerintah</p> <p>4. <b>Secara pemecah masalah</b> dibuktikan dengan adanya program yang dijalankan oleh pemerintah sebagai katalisator yang telah dijelaskan sebelumnya, maka berguna untuk memecah berbagai permasalahan teknologi digital bagi para pelaku UMKM</p>
		Dinamisator	1. Peningkatan kemampuan dan kapasitas UMKM

			<p>dalam pemberdayaan sendiri</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mendorong adanya inovasi dan pemanfaatannya dalam teknologi</li> <li>3. Peningkatan dalam konsep pemberdayaan partisipatif serta sebagai bentuk pemercepat perubahan</li> </ol>
		<p>Peran pemerintah sebagai dinamisator yang berkaitan dengan literasi digital dijabarkan sebagai berikut :</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Secara informasi dan data</b> digunakan untuk memperoleh bahan dari <i>stakeholder</i> yang ikut serta dalam mengembangkan literasi digital bagi pelaku UMKM.</li> <li>2. <b>Secara komunikasi dan kolaborasi</b>, peran pemerintah disini sangat</li> </ol>

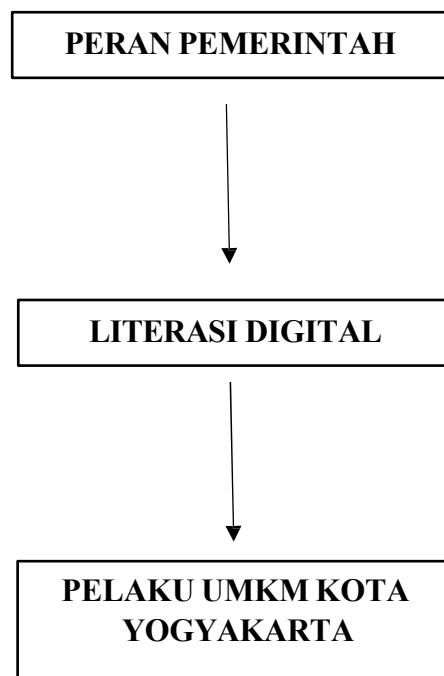
			<p>penting saat melakukan kerja sama dengan pihak di luar pemerintah dalam meningkatkan literasi digital bagi pelaku UMKM</p> <p>3. <b>Secara keamanan,</b> peran pemerintah sebagai katalisator yang berkaitan dengan literasi digital secara keamanan digunakan untuk memberikan rasa aman bagi pelaku UMKM dalam merasakan sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah</p> <p>4. <b>Secara pemecah masalah,</b> peran pemerintah dalam memberdayakan program UMKM dalam rangka</p>
--	--	--	--

			meningkatkan literasi digital tersebut dianggap sebagai pemecah permasalahan UMKM.
--	--	--	--

(Sumber: Nurdin M., 2014)

## I. Kerangka Berfikir

Berdasarkan rumusan masalah dan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perlu dibuat suatu kerangka berfikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Berikut adalah kerangka berfikir dari penelitian ini yang berjudul “PERAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN LITERASI DIGITAL BAGI PELAKU UMKM DI KOTA YOGYAKARTA”



## **J. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini menggambarkan suatu pendekatan yang berkaitan dengan masalah, fenomena, situasi, atau perilaku khusus sebagai fokus penelitian. Hasilnya dinyatakan dalam kalimat-kalimat yang memberikan penjelasan lebih rinci mengenai pembahasan yang lebih spesifik (Abdussamad, 2021).

Menurut Sugiyono (2006:14) data kualitatif adalah temuan fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan lebih mendalam melalui data yang disajikan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Metode ini dipilih sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dipilih di Kota Yogyakarta, dengan fokus pada UMKM yang beroperasi di sana. Pemilihan Kota Yogyakarta sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan, termasuk statusnya sebagai tujuan wisata yang populer dan sebagai salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki sejumlah besar UMKM. Keputusan ini didasarkan pada aspek- aspek seperti efektivitas promosi produk, kontribusi UMKM terhadap perekonomian, pelaksanaan program pemberdayaan UMKM, pertumbuhan jumlah UMKM, serta strategi pengembangan UMKM dalam menghadapi



tantangan ekonomi global. Semua faktor ini menjadi motivasi utama bagi peneliti untuk menjalankan penelitian di Kota Yogyakarta.

### 3. Jenis Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah “data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari sumber asli atau pertama. Data ini diperoleh melalui melakukan wawancara dengan individu di sekitar dan mengamati secara langsung perilaku masyarakat di lokasi tertentu (Pratiwi, 2017). Fokus utama dalam penyusunan skripsi ini adalah informasi yang diperoleh dari wawancara dengan pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan pemerintah yang berkaitan dengan tujuan agar peneliti mendapatkan data yang akurat serta mendapatkan informasi atau kebijakan pemerintah terkait UMKM di Kota Yogyakarta.

**Tabel 1. 5 Sumber Data Primer**

<b>Sumber Data</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data</b>
Bappeda Kota Yogyakarta	Wawancara
Pelaku UMKM Kota Yogyakarta	Wawancara
Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta	Wawancara
Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Yogyakarta	Wawancara

Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara pada dua pelaku UMKM yang didasarkan pada kriteria yaitu:

1) Omset tahunan usaha yang stabil

Mengacu pada situasi di mana pendapatan atau penjualan dalam suatu bisnis cenderung stabil dan tidak mengalami variasi yang mencolok dari satu periode ke periode selanjutnya.

2) Go digital

Mengacu pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang secara aktif memanfaatkan teknologi digital dan platform online guna meningkatkan efisiensi operasional, strategi pemasaran, peningkatan penjualan, dan interaksi yang lebih baik dengan pelanggan.

3) Inovasi produk atau proses

Langkah krusial bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk tetap relevan dan bersaing dalam pasar yang terus mengalami perubahan. Pengembangan produk baru dapat menjadi sarana bagi UMKM untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang, sementara perubahan dalam proses operasional dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan bisnis.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2008) data sekunder adalah “sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Data sekunder mengacu pada informasi yang diperoleh oleh penulis dari subjek penelitian, yang dapat dianggap sebagai sumber informasi yang sudah ada, seperti bahan bacaan di perpustakaan yang terkait dengan topik penulisan tersebut. Pengumpulan data sekunder dapat melibatkan pencarian dan pengambilan informasi dari berbagai sumber, seperti arsip dokumen seperti buku, artikel, literatur, jurnal penelitian, dan situs pemerintah yang menyediakan data terkait peran pemerintah dalam mendukung pengembangan UMKM.

**Tabel 1. 6 Sumber Data Sekunder**

<b>Nama Data</b>	<b>Sumber Data</b>
Jumlah Data UMKM Kota Yogyakarta	Dinas Koperasi dan UKM DIY
Data usaha Kota Yogyakarta	<a href="https://dodolan.jogjakota.go.id/">https://dodolan.jogjakota.go.id/</a>

**4. Teknik Pengumpulan Data**

a. Observasi

Menurut Sudjono (2006), Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara terstruktur terhadap fenomena-fenomena yang menjadi fokus dalam

penelitian. Pendekatan ini melibatkan observasi langsung, teliti, dan cermat terhadap suatu peristiwa, sehingga data yang dihasilkan mencakup detail-detail yang relevan. Dalam konteks penelitian ini, observasi dilakukan selama jam operasional normal UMKM dengan tujuan untuk memahami proses sehari-hari, interaksi dengan pelanggan, serta bagaimana UMKM menjalankan bisnis mereka secara menyeluruh, termasuk penggunaan teknologi, respons masyarakat terhadap perubahan pasar, dan peran pemerintah terhadap UMKM. Hasil observasi ini kemudian dianalisis untuk memahami peran pemerintah dalam meningkatkan literasi digital di UMKM yang menjadi fokus penelitian.

Observasi pada penelitian ini akan mendapatkan hasil observasi mengenai peran pemerintah dalam meningkatkan literasi digital bagi pelaku UMKM sesuai dengan indikator peran pemerintah dan literasi digital dalam penelitian, serta pemahaman pelaku UMKM setelah mendapatkan sosialisasi dan melaksanakan program pemerintah terkait dengan literasi digital.

b. Wawancara

Menurut Mahmud (2011), wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara terstruktur terhadap fenomena-fenomena yang menjadi fokus dalam penelitian. Pendekatan ini melibatkan wawancara langsung,

teliti, dan cermat terhadap suatu peristiwa, sehingga data yang dihasilkan mencakup detail-detail yang relevan. Dalam konteks penelitian ini, wawancara dilakukan selama jam operasional normal UMKM dengan tujuan untuk memahami proses sehari-hari, interaksi dengan pelanggan, serta bagaimana UMKM menjalankan bisnis mereka secara menyeluruh, termasuk penggunaan teknologi, respons masyarakat terhadap perubahan pasar, dan peran pemerintah terhadap UMKM. Wawancara pada penelitian ini akan berfokus pada pemerintah dan pelaku UMKM, dimana kedua objek tersebut akan dibedakan sesuai dengan peran dan jenisnya. Penelitian ini akan mewawancarai beberapa informan, antara lain:

1. Ibu Prilia Astuti selaku Ketua Tim Kerja Pengembangan Dunia Usaha di Bappeda Kota Yogyakarta.
2. Bapak Joko dan Bapak Harno yang bertugas di bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan di Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta.
3. Bapak Novi Satria Wisantoro selaku Ketua Tim Kerja Substansi Pengelolaan Data Informasi dan Penguatan Manajemen Usaha Mikro di Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Yogyakarta.
4. Ibu Dewi selaku Ketua Kominfo Bidang Informasi Kota Yogyakarta.
5. Ibu Nungky selaku pemilik UMKM Creative Batik.
6. Ibu Ayu Ratna selaku pemilik UMKM Diby Leather.

c. Dokumentasi

Selain menggunakan metode wawancara, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi. Dalam hal ini dokumentasi yang dimaksud berupa catatan tertulis yang diterima peneliti dari narasumber terkait suatu hal yang telah terjadi baik fakta dan data Kumpulan arsip, yang melibatkan berbagai jenis informasi terkait peran Pemerintah dalam peningkatan literasi digital bagi pelaku UMKM di Kota Yogyakarta sebagai bahan dokumentasi yang dapat dilampirkan dalam penelitian. Studi dengan melakukan penyelidikan data dokumen penting, berita, jurnal, serta file terangkum yang terdapat dalam dokumentasi penelitian.

## **5. Teknik Analisa Data**

a. Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data (Sugiyono, 2016). Teknik analisis data adalah suatu pendekatan yang diperlukan untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam konteks penelitian. Tahap awal akan mencakup proses pengumpulan data yang nantinya akan dianalisis menggunakan metode studi kasus kualitatif. Dalam pendekatan studi kasus kualitatif ini, informasi akan diperoleh melalui pengalaman individu terkait fenomena yang akan dibahas dalam skripsi ini, dengan tujuan mendapatkan pemahaman tentang peran pemerintah dalam meningkatkan keterampilan digital dan literasi digital di kalangan UMKM di Kota Yogyakarta. Metode

kualitatif dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, yang memungkinkan pengumpulan data secara langsung dari narasumber melalui ekspresi lisan atau tulisan. Proses pengumpulan data mencakup kegiatan lapangan seperti observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Selain itu, data sekunder yang diperoleh dari penelitian sebelumnya, seperti jurnal dan dokumen terkait lainnya, juga akan digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

b. Penyajian Data

Dalam hal ini menurut Matthew B.M (1992), membatasi suatu “penyajian” sebagai kumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan untuk membuat kesimpulan dan mengambil tindakan. Dalam penelitian kualitatif, data disajikan melalui uraian ringkas, diagram, keterkaitan antar kategori, *flowchart*, dan bentuk penyajian lainnya (Sugiyono, 2016). Pada penelitian kualitatif, metode yang umum digunakan untuk menyajikan informasi adalah melalui teks berupa cerita atau narasi. Peneliti pada penelitian ini akan menjelaskan data yang ditemukan dan diperoleh dari hasil penelitian dengan pemilik UMKM di Kota Yogyakarta, yang bertindak sebagai informan utama. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan informan, dan dalam proses pembahasan data, peneliti akan mengelompokkan informasi mengenai kegiatan usaha informan yang diperoleh dari wawancara tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahap akhir suatu tahap penelitian yang berperan sebagai jawaban terhadap pertanyaan penelitian (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian kualitatif, penutup menandai penemuan-penemuan baru yang belum pernah diketahui sebelumnya. Suatu kesimpulan dapat diukur dari dukungan bukti yang sah dan konsisten. Kesimpulan harus didasarkan pada fakta dan informasi yang ditemukan secara langsung di lapangan atau disampaikan oleh para informan, bukan sekadar hasil interpretasi peneliti.